



LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI
BIDANG PERDAGANGAN, KAWASAN PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN
PERSAINGAN USAHA, DAN BUMN

Rapat ke	: 14 (empat belas)
Tahun Sidang	: 2025-2026
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi VI DPR RI
Rapat Dengan	: Menteri Koperasi RI
Hari, Tanggal	: Kamis, 11 Juni 2026
Pukul	: 10.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Adisatrya Suryo Sulisto (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Anggrek Kurnianti, S.H., M.H., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Koperasi RI Tahun Anggaran 2027.
Hadir	: 1. 23 orang dari 46 orang Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono; 3. Wakil Menteri Koperasi RI, Farida Farichah; beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025, maka Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada pukul 10.36 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Kamis, 11 Juni 2026, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Bapak Adisatrya Suryo Sulisto, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Menteri Koperasi mengenai pagu anggaran indikatif Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp542.886.325.000,- (*Lima Ratus Empat Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 158.727.050.000,- (*Seratus Lima Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*).
 - b. Program Perkoperasian sebesar Rp 384.159.275.000,- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Menteri Koperasi mengenai usulan tambahan pagu anggaran Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 1.345.828.236.000,- (*Satu Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*) dengan alokasi sebagai berikut:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 228.374.607.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah*).
 - b. Program Perkoperasian sebesar Rp 1.117.453.629.000,- (*Satu Triliun Seratus Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
3. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Koperasi untuk:
 - a. Memperhatikan porsi anggaran untuk fungsi pembinaan, pendampingan, monitoring, evaluasi, sosialisasi, dan pengawasan koperasi, khususnya terhadap pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi lainnya.
 - b. Memperkuat aspek perencanaan, studi kelayakan, pengawasan, pembinaan, indikator kinerja, serta roadmap bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) guna memastikan program ini benar-benar menjadi instrumen penguatan ekonomi rakyat yang berkelanjutan dan tidak menimbulkan risiko tingginya koperasi mangkrak di masa mendatang.
 - c. Melakukan verifikasi dan validasi secara menyeluruh terhadap kelayakan lokasi, potensi usaha, serta kebutuhan masyarakat, sebagai dasar pengambilan keputusan agar program tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian target kuantitatif, tetapi mampu menciptakan koperasi yang produktif dan berkelanjutan.
 - d. Memastikan pengembangan usaha koperasi harus tetap sejalan dengan prinsip ekonomi Pancasila, mendorong persaingan yang sehat, memperkuat ekonomi rakyat, dan menghindari praktik yang berpotensi mematikan pelaku usaha lainnya.

- e. Memperkuat fungsi pembinaan, pendampingan, dan pengawasan koperasi agar tidak hanya berorientasi pada pembentukan kelembagaan, tetapi juga memastikan koperasi mampu beroperasi secara sehat dan berkelanjutan.
4. Komisi VI DPR RI meminta Menteri Koperasi untuk menyampaikan jawaban tertulis secara lengkap dan komprehensif dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja atas seluruh pertanyaan, pandangan, dan masukan yang telah disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI selama Rapat pada hari ini.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.57 WIB.

MENTERI KOPERASI RI,

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

Ttd.

FERRY JULIANTONO

**ADISATRYA SURYO SULISTO
A-206**